

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Institusi internasional, dalam konteks ini adalah Piagam PBB dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), mencari tempat untuk menetap atau tempat yang lebih aman merupakan salah satu hak asasi manusia dan negara anggota PBB wajib menghormatinya. Namun, tanggapan Polandia menunjukkan bahwa negara tersebut tidak menghormati hak tersebut. Di satu sisi, Polandia merupakan salah satu negara Eropa yang telah menerima sejumlah besar pengungsi dari Ukraina dengan hampir satu juta pengungsi Ukraina terdaftar di Polandia dan sekitar satu setengah juta orang mengajukan permohonan suaka, perlindungan sementara, atau skema perlindungan serupa berdasarkan laporan UNHCR per 15 Desember 2023. Tidak hanya itu, Polandia telah menyambut hangat para pengungsi Ukraina, baik dari pemerintah maupun masyarakat Polandia.

Survei yang dilakukan oleh CBOS sepanjang tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Polandia memandang penerimaan pengungsi Ukraina sebagai hal yang positif. Selain itu, penduduk Polandia juga membantu para pengungsi Ukraina dengan memberikan sumbangan atau bentuk bantuan lainnya. Pemerintah Polandia bahkan membuat undang-undang khusus untuk membantu para pengungsi Ukraina untuk menetap di Polandia. Sayangnya, hal ini tidak berlaku bagi para pengungsi Timur Tengah. Survei dari Pew Research Center dan CBOS pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Polandia memandang negatif para pengungsi Timur Tengah. Selain itu, pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi terhadap para pengungsi Timur Tengah selama Krisis Migran pada tahun 2015.

Fenomena unik ini menimbulkan pertanyaan, meskipun sudah ada dua lembaga internasional yang berfungsi sebagai norma dalam hubungan internasional, apa alasan yang mendasari kedua tanggapan Polandia yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tanggapan Polandia yang kontras terhadap para pengungsi Ukraina dan Timur Tengah, meskipun terdapat norma-norma internasional yang

ditetapkan oleh Piagam PBB dan UDHR yang mewajibkan negara-negara untuk menghormati hak untuk mencari suaka.

Paradigma konstruktivisme menawarkan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut, khususnya dengan memanfaatkan gagasan Alexander Wendt tentang identitas suatu Negara untuk memahami tindakan suatu Negara di arena internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa Identitas Korporat dan Identitas Tipe memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap Polandia.

Dalam hal Identitas Korporat, identitas Polandia dibentuk melalui sejarah panjang perjuangannya melawan dominasi asing. Pengalaman historis ini membentuk pemahaman Polandia kontemporer tentang pentingnya kedaulatan dan membentuk kebijakan defensif terhadap pengaruh asing. Hubungan Polandia dengan Ukraina dan Timur Tengah mencerminkan dampak narasi historis terhadap kebijakan Polandia. Pengalaman Bersama melawan dominasi asing, terutama dominasi Rusia, membentuk perasaan solidaritas antara Polandia dan Ukraina. Hal ini tercermin dalam penerimaan pengungsi Ukraina yang dilihat sebagai saudara seperjuangan dalam mempertahankan kedaulatan. Sebaliknya, berdasarkan sejarah terdapat minimnya interaksi antara Polandia dan negara-negara di Timur Tengah. Akibatnya, pengungsi dari wilayah ini dipandang sebagai entitas asing yang berbeda secara budaya dan agama, sehingga kebijakan terhadap mereka lebih ketat, sebagaimana Polandia melihat Rusia sebagai entitas asing yang mengancam keberlangsungan hidup identitas Polandia.

Sedangkan berdasarkan Identitas Tipenya, Polandia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai kepercayaan Katolik. Kepentingan Polandia untuk menjaga nilai-nilai Katolik membuat Polandia melakukan sekuritisasi isu migrasi sehingga menggambarkan pengungsi dari Timur Tengah, terutama Muslim, sebagai ancaman terhadap nilai dan budaya Katolik. Di sisi lain, pengungsi dengan kepercayaan Kristen dan Ukraina lebih diterima karena dianggap sesuai dengan identitas budaya dan agama Polandia.

Baik Identitas Korporat maupun Identitas Tipe Polandia menunjukkan bahwa faktor-faktor nonmaterial, seperti identitas aktor negara, dapat berfungsi sebagai determinan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Pendekatan unik

Polandia menunjukkan bahwa aktor negara tidak selalu bertindak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mempertahankan keamanannya. Sebagai contoh, meskipun terdapat tumpang tindih antara kebijakan Polandia untuk melawan ancaman bersenjata dari Rusia dan keputusannya untuk menerima pengungsi Ukraina guna meringankan beban Ukraina, kebijakan ini juga memerlukan mobilisasi sumber daya ekonomi dan manusia di dalam negeri untuk menyediakan tempat berlindung yang memadai bagi para pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa Polandia harus mengorbankan aspek-aspek keamanan sumber dayanya demi elemen-elemen yang tidak berwujud dan bersifat ideasional. Sebaliknya, penolakan terhadap pengungsi Timur Tengah dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga keamanan nasionalnya, tetapi hal ini juga mencerminkan bahwa identitas Polandia merupakan faktor penentu dalam membentuk kebijakan ini.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Penelitian ini menunjukkan identitas memberikan pengaruh dalam membentuk perilaku aktor negara. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya factor material yang berperan dalam pembentukan suatu kebijakan tetapi juga faktor nonmaterial yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, dengan mengakui identitas sebagai determinan perilaku negara, para pembuat kebijakan dapat lebih memahami dan mempertimbangkan identitas aktor lain saat merumuskan kebijakan. Hal ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan peka terhadap budaya. Selain itu, memahami bagaimana identitas membentuk motivasi dan tindakan dapat membantu para pembuat kebijakan menavigasi perbedaan budaya dan sejarah yang kemudian dapat mendorong dialog dan mengurangi ketegangan.

5.2.2 Saran Teoritis

Meskipun Konstruktivisme memberikan wawasan berharga mengenai fenomena ini, ia hanyalah salah satu dari sekian banyak perspektif dalam Hubungan Internasional. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas, penelitian di masa

mendatang harus mempertimbangkan paradigma alternatif, seperti paradigma arus utama Realisme dan Liberalisme atau paradigma kritis seperti Teori Kritis dan Neokolonialisme, yang dapat menawarkan penjelasan yang saling melengkapi atau kontras. Selain itu, mengeksplorasi konsep Konstruktivis lainnya, seperti peran norma internasional, dapat memperkaya analisis. Peneliti juga dapat mengalihkan fokus penyelidikan, bergerak melampaui identifikasi faktor untuk mengeksplorasi bagaimana atau mengapa dinamika tertentu muncul, dengan demikian memberikan penjelasan yang lebih bernuansa dan komprehensif mengenai fenomena tersebut.